



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI I DPR RI  
KE PALESTINA, MESIR DAN YORDANIA  
TANGGAL 26 NOVEMBER - 5 DESEMBER 2012**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
2012**

## I. PENDAHULUAN

Terjadinya konflik bersenjata antara Palestina dan militer Israel di Gaza serta sengketa yang terus berlarut diantara keduanya mendorong Komisi I DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Palestina, Mesir dan Yordania. Kunjungan spesifik ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR RI berdasarkan Undang-Undang nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Tertib DPR RI.

Secara umum, tujuan dari kunjungan ini adalah dalam rangka pelaksanaan peran *parliamentary diplomacy* serta peran pengawasan DPR RI terhadap mitra kerja bidang luar negeri. Secara lebih spesifik, kunjungan ini memiliki tujuan:

1. Membangun dan meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Negara-negara sahabat melalui *Parliament Diplomacy* antara Komisi I DPR RI dengan pihak legislative maupun eksekutif dari pemerintahan/otoritas Palestina, Mesir dan Yordania;
2. Penjajakan pembukaan kantor perwakilan Indonesia di Palestina secara formal dan permanen;
3. Melakukan peran dan fungsi pengawasan Komisi I DPR RI terhadap kantor perwakilan Indonesia di luar negeri (KBRI) baik di Mesir dan Yordania khususnya dalam perwan perlindungan WNI serta dalam peran fasilitator/mediator bagi perdamaian di Timur Tengah;
4. Pemantauan langsung terhadap perkembangan situasi sosial politik Timur Tengah dalam era transformasi negara-negara Arab menuju sistem demokrasi (*Arab Spring*), khususnya Mesir dan Yordania.

Beragam data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi sosial politik di Palestina, Mesir dan Yordania tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan rapat-rapat kerja dengan pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri sebagai mitra kerja bidang luar negeri.

Kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI ke Palestina, Mesir dan Yordania dilaksanakan dari tanggal 26 November sampai dengan tanggal 5 Desember 2012, diikuti oleh 8 (delapan) orang Anggota Komisi I DPR RI dan didampingi oleh 2 (dua) orang Sekretariat Komisi I DPR RI serta 1 (satu) orang Tenaga Ahli Komisi I DPR RI.

Melekat bersama rombongan tersebut adalah 7 (tujuh) jurnalis dari berbagai media, yaitu TVRI, Metro TV, TV One, Media Online Detik dan Republika. Juga turut

bersama Komisi I DPR RI adalah beberapa LSM yang memiliki perhatian terhadap perjuangan Palestina yaitu: Aksi Cepat Tanggap (ACT), Komite Nasional bagi Rakyat Palestina (KNRP), Dompot Dhuafa, Rumah Zakat Indonesia dan Bulan sabit Merah Indonesia. Untuk tim dari LSM tersebut, keikut sertaannya dengan rombongan Komisi I DPR RI hanya sebatas di Gaza, Palestina, dalam rangka menyampaikan bantuan berupa uang, obat-obatan, alat-alat medis dan perlengkapan lainnya serta sebagai relawan kemanusiaan untuk pemulihan fisik maupun psikis masyarakat Gaza pasca serangan militer Israel.

## **II. HASIL KUNJUNGAN**

Konsentrasi utama dari kunjungan Komisi I DPR RI ini adalah terkait persoalan Palestina, yaitu memantau sejauh mana dampak konflik dan serangan militer Israel terhadap masyarakat Palestina di Gaza, peninjauan pembukaan kantor perwakilan resmi dan diplomatik Indonesia di Palestina, serta untuk mengetahui lebih jauh mengenai sikap negara-negara Arab dalam memandang persoalan Palestina serta upaya rekonsiliasi antara faksi-faksi perjuangan di Palestina.

Tekait dengan kondisi faktual dimana wilayah Palestina terbagi dua antara Tepi Barat (yang dikuasai faksi Fatah) dengan pintu masuk dari Yordania dan Gaza (yang dikuasai faksi Hamas) dengan pintu masuk melalui Mesir, maka selain ke Palestina, tim kunjungan spesifik Komisi I DPR RI melakukan kunjungan sekaligus ke Mesir dan Yordania.

Namun demikian, kunjungan ke Mesir dan Yordania bukan semata kebetulan atau hanya *stopping by*, tetapi kedua negara tersebut memiliki peran penting dan sangat strategis bagi proses perdamaian Palestina-Israel yang merupakan inti dari konflik di Timur Tengah hingga saat ini. Disamping itu, kedua negara tersebut menjadi banyak acuan bagi para pemuda Indonesia untuk melanjutkan studi dalam disiplin keagamaan serta adanya persoalan klasik yaitu persoalan perlindungan WNI/TKI. Dengan karakternya masing-masing, Mesir dan Yordania adalah dua negara yang memiliki perbedaan sistem dan pengalaman demokrasi yang khas dalam menghadapi gejolak demokratisasi yang melanda Timur Tengah atau *Arab spring*. Sehingga dengan demikian, kunjungan ke Mesir dan Yordania memiliki makna strategis baik dalam konteks bilateral antara kedua negara dengan Indonesia, multilateral (Timur Tengah) maupun dalam konteks *stepping forward* bagi perdamaian Palestina dan tanah Arab.

## **1. Mesir**

Dalam kunjungannya ke Mesir, tim Komisi I DPR RI melaksanakan pertemuan dengan Majelis Syuro (MPR) Mesir, organisasi Liga Arab dan dialog dengan masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan di Mesir. Mesir adalah satu-satunya akses untuk memasuki Gaza, Palestina. Dari Mesir ini kemudian delegasi memasuki Gaza melalui pintu perbatasan di Raffah.

### **a. Majelis Syuro**

Tempat pertama yang dikunjungi tim Komisi I DPR RI adalah Majelis Syuro Mesir, Kairo. Majelis Syuro atau Majelis Tinggi merupakan bagian dari parlemen Mesir. Dalam sistem politik Indonesia, Majelis Syuro adalah MPR. Dinamika politik internal yang tinggi pasca transisi dari rezim Mubarak ke sistem baru menghasilkan konflik dan intrik politik yang sangat tajam. Salah satu dampaknya adalah dibubarkannya Majelis Sya'ab atau Majelis Rendah (DPR) Mesir oleh Mahkamah Konstitusi. Praktis, parlemen Mesir hanya memiliki Majelis Syuro.

Kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Majelis Syuro diterima oleh Wakil Ketua MPR sekaligus Kepala Urusan Arab, Hubungan Luar Negeri dan Keamanan Nasional, DR. Reda Fahmy. Turut mendampingi beliau adalah 5 (lima) koleganya dari MPR, yaitu Abdul Fattah Shahin, Mohammed Ezzat, Tamer Makki, Hasan Arif dan Abdel Azem serta 2 (dua) orang dari Kementerian Luar Negeri Mesir, yaitu Aly el Hafny (Urusan Parlemen) dan Alaa el Kasyief (Deputi Asmenlu Urusan Asean).

Dalam kesempatan ini, Reda Fahmy menyampaikan beberapa hal, yaitu:

- 1) Menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan Komisi I DPR RI ke Mesir sebagai penguatan hubungan baik antara Mesir dan Indonesia yang telah terjalin selama puluhan tahun.
  
- 2) Sejarah perubahan Mesir mulai terlihat pada tahun 2004, yaitu munculnya ide tentang Timur Tengah baru yang menginisiasi munculnya beragam demonstrasi menuntut demokratisasi. Pada saat pemilu tahun 2004 diselenggarakan, partai-partai Islam memperoleh kursi lebih dari 25%. Perolehan jumlah kursi tersebut akan lebih banyak apabila pemilu dilakukan secara jujur dan peluang kelompok Islam dibuka secara lebih luas. Dalam menghadapi kebangkitan kelompok Islam, pemerintah yang

berkuasa saat itu melakukan beragam tindakan represif dan kebijakan yang menyulitkan kelompok Islam.

- 3) Beragam tekanan represif dan akumulasi kekecewaan masyarakat melahirkan revolusi yang sangat alamiah dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2011. Pasca revolusi, kekuasaan Mesir berada di tangan Dewan Tinggi Militer atau *Supreme Council of the Armed Forces* (SCAF). Pada tanggal 18 maret 2011, SCAF mengeluarkan keputusan tentang penyelenggaraan pemilihan legislatif, pilpres dan penyusunan konstitusi. Rencana semula, SCAF akan menyerahkan kekuasaan pada September 2011 namun karena situasi yang tidak memungkinkan, diperpanjang hingga tahun 2012. Pada tahun 2012, diadakan pemilu dan pertama kali terpilih presiden dari sipil yang kemudian banyak menghadapi kendala dan tantangan.
- 4) Salah satu tantangan presiden terpilih adalah membentuk konstitusi baru. Untuk membentuk konsitusi ini, dibentuk Dewan Konstitusi tetapi tidak berjalan lancar dan terpaksa dibubarkan di tengah jalan. Dibentuklah kemudian Dewan Konstitusi Kedua dengan komposisi anggota yang lebih proporsional, mengakomodasi berbagai kelompok dan kepentingan. Ditengah kendala yang dihadapi dewan kedua ini, rakyat dikejutkan denga keputusan MK yang membubarkan DPR. Akibatnya, Mesir seperti kembali ke titik nol.
- 5) Presiden terpilih kemudian mengeluarkan kebijakan berani yaitu meminta militer *back to barrack*. Terakhir, presiden mengeluarkan keputusan strategis guna melindungi lembaga-lembaga negara. Beberapa pihak menganggapnya hanya untuk melindungi kepresidenan saja.
- 6) Terkait banyaknya perbedaan pendapat tersebut, MPR sangat mendukung dilakukannya dialog nasional Mesir untuk keluar dari krisis.

Ketua tim Delegasi Komisi I DPR RI menyampaikan dua hal yaitu respon terhadap dinamika politik internal Mesir serta rencana kujungan dan persoalan konflik Palestina. Terkait proses transisi menuju demokrasi, ketua tim delegasi memaparkan:

- 1) Para pejuang demokrasi 1998 di Indonesia banyak terinspirasi oleh tulisan tokoh Mesir tentang keterkaitan Islam dan Demokrasi: “Mesir yang mengajarkan tentang Islam dan demokrasi, tetapi Indonesia yang pertama kali mempraktekkannya”. Dalam konteks ini, ketua tim berharap bahwa Mesir juga dapat mempraktekkan hal tersebut di negaranya.
- 2) Demokrasi hanya dapat bermakna apabila dapat melahirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Karena itu, transisi demokrasi di Mesir harus bertujuan pada penciptaan kesejahteraan masyarakat Mesir.
- 3) Proses dan pengalaman transisi demokrasi di Indonesia hendaknya dapat diambil pelajaran oleh Mesir agar negara tidak terjerumus pada konflik internal yang memecah belah negara serta sebagai contoh bahwa praktek Islam dan demokrasi adalah dua hal yang dapat saling mendukung dan sinergis.

Untuk persoalan Palestina, Ketua tim Delegasi Komisi I DPR RI menyampaikan beberapa hal yaitu:

- 1) Rencana kunjungan tim ke Gaza sebagai bentuk simpati terhadap penderitaan rakyat Palestina di Gaza dan dukungan riil terhadap perjuangan Palestina merdeka;
- 2) Menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan prakarsa Mesir yang melahirkan gencatan senjata antara Palestina (Gaza) dan Israel.
- 3) Indonesia memiliki hubungan psikologis yang sangat erat dengan Palestina dan Mesir. Dua negara ini adalah yang pertama kali mengakui deklarasi kemerdekaan Indonesia ketika negara lain justru bersikap ragu. Karenanya, Indonesia memiliki hutang sejarah terhadap Palestina dan memiliki keinginan kuat untuk memenuhinya melalui upaya mendukung kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat penuh atas tanah airnya. Terkait hal ini, Indonesia berharap Mesir dapat memainkan peran yang lebih besar untuk menciptakan perdamaian di Palestina dan mendukung upaya kemerdekaan wilayah tersebut.

Dalam menanggapi isu Palestina, Reda Fahmy menegaskan bahwa nama lengkap Mesir adalah Republik Arab Mesir. Artinya, segala bentuk isu yang terjadi di negara Arab, Mesir akan membantu. Di negara Arab, isu palestina adalah isu inti dan merupakan isu keamanan nasional yang sangat penting bagi Mesir karena berbatasan langsung dengan Gaza. Ditegaskan bahwa Mesir akan selalu membela hak seluruh warga Palestina, apakah Muslim, Kristen atau lainnya. Daratan palestina adalah hak bagi orang palestina. Dalam konflik Palestina-Israel, Mesir akan memosisikan dirinya secara netral tetapi mendukung Palestina untuk memperoleh haknya dengan cara apapun. Namun demikian, Mesir lebih memilih jalan damai dengan cara menekan Israel untuk menerapkan resolusi PBB 242.\* Majelis Syuro Mesir memberikan tanggapan positif terhadap rencana kunjungan Komisi I DPR RI ke Palestina dan memberikan dukungan penuh.

Lebih lanjut mensikapi persoalan politik internal, Reda Fahmy mengakui bahwa sejak revolusi, Mesir dihadapkan pada banyak persoalan. Namun ia optimis bahwa apa yang dilakukan Mesir saat ini semata untuk tujuan kepentingan nasionalnya. Mekanisme mencari solusi terbaik bagi Mesir saat ini adalah adanya dialog bagi semua kelompok.

Dalam kesempatan ini, dua anggota Majelis Syuro, yaitu Mohammed Ezzat dan Abdel Azim berharap adanya peningkatan kerjasama yang lebih erat antara Indonesia dan Mesir di berbagai bidang, khususnya ekonomi dan perdagangan.

#### **b. Liga Arab**

Liga Arab merupakan organisasi yang terdiri dari negara-negara Arab dengan markasnya terletak di Kairo, Mesir. Anggotanya terdiri dari 22 negara, terbentang dari Samudera Atlantik di barat hingga Laut Arab di Timur, dan dari Laut Tengah di utara hingga Tanduk Afrika dan Samudra Hindia di tenggara. Sebagai organisasi yang mempersatukan negara-negara Arab, organisasi ini memiliki peran vital dan strategis terkait isu-isu yang

- 
- Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 (S/RES/242) disetujui secara sepakat pada 22 November 1967 setelah berakhirnya perang enam hari. Resolusi tersebut menyerukan tercapainya sebuah perdamaian yang langgeng di kawasan tersebut dengan mengimplementasikan dua butir kesepakatan berikut:
    1. Penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah yang diduduki pada konflik 1967.
    2. Penghapusan klaim-klaim wilayah oleh kedua belah pihak (Israel dan Arab) dalam masa konflik, serta menghormati hak keberadaan setiap negara di kawasan tersebut dengan mengakui batas wilayah yang telah disepakati bersama.

berkembang di tanah Arab, seperti isu Palestina maupun isu regional *Arab Spring*.

Di Liga Arab, delegasi diterima oleh Wakil Sekjen yaitu Mohammed Bin Hally yang didampingi oleh beberapa pejabat Liga Arab. Selain apresiasi terhadap dinamika politik dan demokrasi di Indonesia, Hally menyampaikan isu krusial yang terjadi saat ini di tanah Arab, yaitu Palestina, *Arab Spring* dan konflik Suriah.

- 1) Di dunia Arab, Palestina merupakan isu terbesar bagi dunia Arab dan Timur Tengah. Melalui jalur diplomasi, Liga Arab terus mendukung perjuangan Palestina sebagai anggota PBB. Liga Arab akan memfasilitasi berbagai upaya yang akan mempercepat tujuan tersebut. Perjuangan diplomasi terkait status Palestina di PBB telah menyatukan rakyat Palestina yang terpecah menjadi satu.

Dalam kunjungannya yang dilakukan akhir-akhir ini ke Gaza, terdapat keprihatinan luar biasa di Gaza yang sukar diungkapkan dengan kata-kata. Karenanya, Wakil Sekjen mengharapkan adanya solidaritas internasional terhadap Gaza. Tetapi juga terlihat bahwa rakyat Gaza begitu tegar dan kuat dalam menghadapi tekanan, serangan dan persoalan yang datang dari Israel. Karena kemampuan, ketegaran dan keyakinannya, rakyat Gaza begitu optimis mampu keluar dari persoalan dan mengalahkan Israel.

Seperti halnya Majelis Syuro Mesir, Liga Arab juga memberikan respon positif dan penghargaan terhadap rencana kunjungan Komisi I DPR RI ke Palestina, baik Gaza maupun Tepi Barat.

- 2) Persoalan *Arab Spring* merupakan tsunami sosial politik yang melanda negara-negara Arab dan Timur Tengah. Akibatnya, Negara Arab dan Timur Tengah saat ini banyak menghadapi tantangan dan fokus dalam kasus ini. Semua negara memiliki kasus sendiri, tetapi semuanya harus secara bersama-sama dalam menghadapinya.
- 3) Salah satu negara yang dilanda Arab Spring adalah Suriah yang melahirkan konflik internal yang memilukan dengan jumlah korban yang sangat tinggi. Liga Arab sangat *concern* terhadap masalah ini dan mengupayakan penyelesaian krisis Suriah melalui berbagai lembaga,



termasuk PBB. Perlu ada solusi politik untuk menyelesaikan konflik Suriah melalui berbagai langkah yang telah disampaikan oleh Liga Arab kepada Pemerintah Suriah, negara-negara Arab dan pemerintahan transisi politik secara damai, namun belum ada respon positif dari pemerintah Suriah. Suriah merupakan salah satu negara penting di Arab tetapi saat ini tengah terancam dari berbagai sisi. Liga Arab telah berupaya berkomunikasi dengan seluruh pihak di Suriah dan meminta agar pemerintah Suriah memahami persoalan yang ada dan menekankan bahwa solusi militer bukan solusi terbaik, kecuali hanya akan melahirkan penderitaan.

- 4) Dalam pernyataan lainnya, Liga Arab berharap lebih banyak kepada Indonesia untuk dapat memainkan peran strategisnya dalam membangun komunikasi yang lebih luas antara Indonesia dan Negara-negara Liga Arab. Sebagai negara demokrasi dengan komunitas muslim terbesar, diharapkan Indonesia dapat memainkan peran tersebut melalui GNB dan Konferensi Asia Afrika. Sebagian besar anggota GNB dan KAA adalah negara-negara Islam sehingga Indonesia dinilai akan mampu memelopori pembangunan kerjasama yang baik dalam bidang ekonomi, media dan teknologi informasi. Liga Arab akan sangat berkenan apabila Indonesia, melalui KBRI Mesir menyampaikan proposal kerjasama yang diinginkan.

Mensikapi apa yang disampaikan oleh Wakil Sekjen Liga Arab, Ketua tim delegasi Komisi I DPR RI menyampaikan pandangan:

- 1) Berharap agar langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Liga Arab dapat sejalan atau sinergis dengan apa yang telah dilakukan Indonesia. Dalam konteks *Arab Spring*, isu ini menjadi sangat penting di Indonesia dan melahirkan respon dari banyak kalangan. *Arab Spring* tidak hanya berdampak bagi kawasan regional di Timur Tengah, tetapi juga berdampak secara internasional, salah satunya adalah dampak ekonomi yang dialami oleh negara-negara D-8. Namun demikian, Indonesia berharap bahwa gejala *Arab spring* dapat terlalui dengan baik dan lancar serta menciptakan tatanan ekonomi yang lebih sejahtera bagi masyarakatnya.
- 2) Terkait Suriah, telah dilakukan pembicaraan dengan pihak terkait, seperti Dubes Suriah, Iran, Turki dan negara Arab lain. Sikap Indonesia sama, yaitu perlu ada penyelesaian, transisi yang damai serta jaminan

terhadap keamanan warga sipil. Indonesia lebih memiliki kepentingan yang dalam bagi terciptanya keamanan dan stabilitas di Suriah, karena di Suriah terdapat banyak WNI.

- 3) Dalam kaitannya dengan rencana kunjungan Komisi I DPR RI ke Palestina, maka kunjungan ke Liga Arab merupakan kunjungan penting dan strategis karena forum-forum multilateral seperti Liga Arab memiliki peran penting dan besar dalam mendukung perjuangan Palestina. Indonesia mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan Liga Arab dalam mendukung perjuangan Palestina. Komisi I DPR RI mendesak agar lebih kuat dalam mendorong penguatan eksistensi Palestina merdeka serta mendesak agar negara-negara lain mendukung proposal Palestina merdeka dan menjadi anggota PBB. Dukungan Indonesia kepada Palestina, selain karena amanat konstitusi untuk mendukung setiap bangsa menikmati hak politik menjadi bangsa merdeka, juga karena adanya hutang sejarah terhadap Palestina karena mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali.

Namun demikian, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah dorongan bagi terciptanya rekonsiliasi nasional. Karena banyak pertanyaan terkait efektifitas dukungan terhadap perjuangan Palestina merdeka sementara di sisi lain, rakyat Palestina sendiri tidak bersatu. Oleh karena itu upaya dan ide rekonsiliasi nasional di Palestina perlu didukung oleh semua pihak. Persoalan berikutnya adalah, Palestina saat ini menghadapi persoalan sosial ekonomi akibat keterbatasan akses. Karena itu, perlu ada perhatian serius bagaimana mengakselerasi pembangunan sosial ekonomi di palestina oleh semua pihak.

Dalam akhir sambutannya, Ketua tim Komisi I DPR RI memaparkan adanya kecenderungan perubahan konsentrasi politik internasional. Disampaikan bahwa Perubahan politik membutuhkan komunikasi antar kekuatan regional yang ada. Amerika banyak berkonsentrasi di MENA, tetapi sejak tahun lalu berubah konsentrasi menuju kawasan Asia Timur. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan reorientasi militer Amerika yang dilakukan di Filipina, Australia, Vietnam dan Singapura, khususnya Laut China Selatan. Terkait hal tersebut, maka perlu ada formulasi komunikasi antar regional agar dapat bekerjasama dan bersinergi demi kebaikan negara Islam dan dunia baru yang lebih baik dan sejahtera.

Sejalan dengan gejala tersebut, Indonesia saat ini lebih mengembangkan orientasi politiknya ke kawasan Afrika. Komisi I DPR RI telah melakukan RDP dengan 13 Duta Besar Asia Afrika yang ada di kawasan Timur Tengah untuk mencari gagasan konstruktif dalam rangka membangun kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Timur Tengah. Potensi ekonomi di kawasan ini sangat besar, tetapi tantangan dan kendalanya juga cukup besar yang hanya akan mampu diatasi jika ada kerjasama dan kepentingan bersama.

Terkait usulan yang disampaikan Komisi I DPR RI, Wakil Sekjen Liga Arab berjanji akan menyampaikannya ke seluruh anggota Liga Arab. Hally menyatakan bahwa ini akan menjadi jembatan komunikasi yang penting antara Indonesia dengan Liga Arab karena adanya kepentingan bagi Liga Arab untuk membanun kerjasama yang kuat antar parlemen Indonesia dan parlemen Liga Arab.

### **c. Masyarakat Indonesia di Mesir**

Disela-sela jadwal kunjungan spesifik yang padat, delegasi Komisi I DPR RI menyempatkan diri berdialog dengan segenap unsur masyarakat yang berada di Mesir, khususnya Kairo. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyerap aspirasi WNI yang berada di luar Mesir secara langsung. Sebagian besar yang hadir dalam dialog ini adalah para mahasiswa. Terkait dengan maksud dan tujuan kunjungan delegasi Komisi I DPR RI ke Palestina, Mesir dan Yordania ini, masyarakat khususnya mahasiswa, memberikan apresiasi dan dukungannya.

Dalam pertemuan tersebut, selain disampaikan berbagai persoalan politik nasional (Indonesia) dan internasional, juga diungkapkan berbagai persoalan yang umum dihadapi para mahasiswa di Mesir. Sebagai respon atas kesulitan yang banyak dihadapi oleh para mahasiswa di Mesir, delegasi Komisi I DPR RI memberikan bantuan uang tunai untuk kepentingan mahasiswa.

## **2. Yordania**

Yordania adalah negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Tepi Barat Palestina. Melalui Yordania, delegasi Komisi I DPR RI memasuki Ramallah, Tepi Barat, Palestina. Di Yordania, delegasi melakukan kunjungan dan pertemuan dengan Menteri Pembangunan Politik dan Hubungan Parlemen Yordania, *Palestinian National Council* serta tinjauan langsung ke Shelter TKI/TKW dan dialog dengan beberapa unsur masyarakat Indonesia di KBRI Yordania.

**a. Menteri Pembangunan Politik dan Hubungan Parlemen**

Menteri Pembangunan Politik dan Urusan Parlemen Yordania dijabat oleh Bassam Haddadin. Haddadin memberikan gambaran terkait:

- 1) Kondisi politik di Yordania yang juga tengah dilanda demokoratisasi. Namun demokratisasi di Yordania bersih dari pertumpahan darah, revolusi politik hijau dan bebas dari kerusakan. Sebagai bentuk dari dukungan terhadap perubahan, saat ini pemerintah Yordania telah melakukan revisi terhadap 2/3 undang-undang yang ada dan melakukan penguatan terhadap berbagai otoritas seperti legislatif, pemerintah pusat dan hukum. Langkah konkritnya adalah membentuk MK dan lembaga independen yang mengurus pemilu.
- 2) Penentangan dari oposisi pasti ada, tetapi mereka mendukung langkah perbaikan di Yordania. Perdebatan berada pada kisaran sejauh mana revisi dilakukan. Dalam perubahan tersebut, pemerintah Yordania menegaskan perhatiannya terhadap perbaikan, khususnya stabilitas keamanan negara sebagai syarat utama bagi kelangsungan pemerintah yang baik “tidak ada harganya sebuah perubahan jika tidak dapat perkembangan dalam masyarakat”.
- 3) Pada saat ini masyarakat Yordania sedang berkonsentrasi pada pemilu Januari 2013. Terdapat perbedaan pendapat terhadap kehadiran kelompok Ikhwanul Muslimin karena pengaruhnya terhadap situasi politik kawasan. Gerakan politik ikhwan memiliki perbedaan mendasar dan cenderung radikal sehingga memunculkan perbedaan pandangan di politik Yordania.
- 4) Mensikapi dengan persoalan Palestina, Menteri Bassam memaparkan hal-hal berikut:
  - a. Mengapresiasi dukungan dan rencana kunjungan Komisi I DPR RI ke Palestina.

- b. Yordania merupakan negara penampung pengungsi Palestina terbesar di dunia dan negara terbesar yang memberikan pelayanan terhadap hak-hak mereka serta memiliki prinsip bahwa mereka juga memiliki hak untuk kembali ke palestina. Tahun 1948, banyak pengungsi Palestina ke Yordania dan juga tahun 1967 dimana sebagian pengungsi pada tahun tersebut telah memegang paspor Yordania dan menjadi warga negara Yordania. Ketua dewan senat Yordania saat ini dipimpin oleh orang keturunan palestina.
- c. Terkait konflik Hamas-Fatah, Yordania berupaya untuk berimbang dalam mensikapi konflik Hamas dan Fatah. Contohnya, Yordania memiliki rumah sakit militer di Gaza dan bekerjasama dengan otoritas Hamas. Juga demikian di Tepi Barat. Yordania mendukung penuh rekonsiliasi dua kekuatan politik namun telah menyerahkan upaya-upaya tersebut dan berkoordinasi dengan Mesir.
- d. Yordania memainkan peran penting dalam peningkatan status Palestina di PBB melalui diplomasi yang dilakukan oleh Raja Yordania. Pengakuan Palestina saat ini merupakan simbol langkah politik terhadap kemajuan palestina. Yordania mengharapkan adanya peningkatan kerjasama parlemen untuk mendukung status palestina.

Dalam merespon penjelasan Menteri Bassam Haddadin, Ketua Tim Komisi I DPR RI menyampaikan tiga hal:

- 1) Kembali menegaskan peran dan posisi penting Yordania dalam kasus Palestina sebagai penyangga dan penghubung. Bahkan Yordania, yang memiliki nama resmi Kerajaan Hasyimiah Yordania, telah menegaskan diri sebagai trah yang memiliki turunan langsung Nabi Muhammad, yaitu Bani Hasyim, sehingga memiliki tugas penciptaan perdamaian internasional.
- 2) Pengalaman dengan sejarah transisi demokrasi di Indonesia. Dalam konteks transisi, setiap kelompok perlu diakomodir dalam sistem politik sebagai perwujudan kesetaraan dalam politik dan hukum. Kemudian dijelaskan juga mengenai perjalanan reformasi serta perubahan dan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Penekanannya adalah adanya pembangunan undang-undang yang menjadi dasar pijakan bagi seluruh

pihak. Pembangunan undang-undang itulah ciri dari demokrasi konstitusional yang berbasis pada partisipasi masyarakat.

- 3) Perubahan pandangan dan respon negara-negara besar, khususnya Amerika yang mulai mengarah ke Asia Timur. Sedangkan politik luar negeri Indonesia kini lebih berorientasi ke Timur Tengah dimana Yordania dipandang sebagai negara yang sangat strategis sebagai penghubung Asia dan Timur Tengah. Terkait hal tersebut, maka perlu adanya peningkatan kerjasama yang lebih intensif dalam berbagai bidang antara Indonesia dan Pemerintah Yordania.

**b. Palestinian National Council**

Dewan Nasional Palestina atau *Palesinian National Council/PNC* adalah parlemen rakyat Palestina yang berada di lokasi pengasingan dan kini berpusat di Yordania. PNC adalah beranggotakan 669 orang, 88 orang adalah anggota *Palestinian Legislative Council/PLC* atau DPR-nya Palestina yang tinggal di Gaza dan Tepi Barat. Sedangkan sisanya adalah representasi dari diaspora orang-orang Palestina di pengasingan.

Dalam kunjungannya ke PNC, delegasi Komisi I DPR RI diterima langsung oleh Ketua PNC, Salim Zanoun yang didampingi oleh beberapa anggota PNC lainnya. salah satu dari mereka adalah anggota yang berpakaian khas Kristen Ortodoks. Ini menegaskan bahwa persoalan dan perjuangan Palestina bukan semata persoalan dan kepentingan Islam, tetapi lebih dari itu yaitu persoalan kemanusiaan yang melibatkan semua orang, semua agama.

Dalam pertemuan ini, Ketua Tim menyampaikan ucapan selamat atas perjuangannya terkait status Palestina di PBB menjadi *non state member* dan berharap ini menjadi awal bagi terwujudnya negara Palestina merdeka. Hubungan Indonesia dengan Palestina sangat unik dan erat karena melibatkan seluruh level yaitu masyarakat, pemerintah dan parlemen. Seluruh level di Indonesia kini tengah berbunga mendengar status Palestina namun juga bertanya-tanya terkait persatuan internal rakyat Palestina, khususnya antara Hamas dan Fatah. Pengakuan PBB terhadap Palestina harus ditindaklanjuti dengan konsolidasi internal dan rekonsiliasi seluruh pihak yang ada. Juga disampaikan bahwa Indonesia akan segera membuka perwakilan di palestina walaupun resikonya dubes akan sukar keluar masuk palestina.

Ketua PNC memberikan apresiasi terhadap dukungan Indonesia atas status Palestina di PBB. Menlu Indonesia telah memainkan peran penting dan menjadi orang ketiga yang berbicara di Majelis Umum PBB terkait status Palestina. Penyelesaian konflik dengan Israel hanya akan dilaksanakan dengan jalan perundingan. Optimisme menang melalui jalur perundingan sangat besar seiring dengan pengakuan PBB pada 29 November 2012 terkait status Palestina. Dengan status tersebut, Palestina bukan lagi sebagai wilayah sengketa melainkan daerah jajahan Israel. Status baru ini membuat Israel khawatir terhadap hak-hak Palestina yang dapat menjadi anggota badan-badan PBB dan menuntut tindakan kejahatan perang Israel ke ICC. PNC akan menuntut orang-orang yang terkait pembunuhan tokoh Palestina seperti Syeikh Yasin, Ja'bari, Abu Yusuf, dan lain-lain.

Terakait upaya rekonsiliasi nasional Palestina, PNC tengah berupaya menghentikan perpecahan faksi dan mencari solusi untuk menyatukan warga Palestina dibawah fasilitator Mesir. Kemenangan di PBB dan atas serangan di Gaza menciptakan kondisi baik bagi pencarian solusi persatuan Palestina.

Untuk hubungan Indonesia Palestina, PNC mengusulkan pembentukan Komite Persaudaraan Indonesia Palestina yang anggotanya adalah parlemen Indonesia, PNC dan perwakilan Palestina. Komite ini diharapkan akan mampu mempererat hubungan kedua negara. Ketika Ketua tim delegasi Komisi I DPR RI memberikan souvenir kepada Ketua PNC dengan lambang kereta yang ditarik oleh dua kuda yang dimaknai sebagai gambar perjuangan Palestina-Indonesia dalam bekerjasama, Ketua PNC kemudian akan mengusulkan lambang tersebut sebagai lambang Komite Persaudaraan Indonesia Palestina.

**c. KBRI Amman, Yordania**

Ada tiga agenda yang dilakukan oleh delegasi Komisi I DPR RI di KBRI Amman, Yordania. Pertama, dalam rangka monitoring kinerja KBRI Amman sekaligus menggali informasi terkait persoalan-persoalan politik dalam negeri Yordania, politik regional serta isu Palestina. Kedua, inspeksi terhadap shelter TKI, dan ketiga dialog dengan masyarakat Indonesia yang ada di Yordania.

- 1) Untuk agenda pertama, terkait monitoring, fokus ditekankan pada upaya perlindungan KBRI terhadap WNI dalam kerangka citizen services, lebih khusus lagi terhadap para TKI yang sedang menghadapi persoalan. Perhatian terhadap WNI ini sangat penting mengingat Yordania merupakan salah satu destinasi bagi para pencari kerja di luar negeri (TKI). Terkait TKI, saat ini telah diberlakukan moratorium pengiriman TKI ke Jordania. Namun keberlakuan visa on arrival (*working visa*) cukup mengganggu efektivitas moratorium tersebut karena TKI tetap berdatangan ke Yordania dan seluruhnya menjadi ilegal. Tidak dapat dipastikan jumlah TKI di Yordania namun diperkirakan terdapat sekitar 40.000 orang dan hanya 11.000 orang saja yang terdata. Status ilegal ini menjadikan para TKI sulit untuk didata dan dievakuasi segera apabila terjadi kondisi darurat. Banyak TKI yang bermasalah kemudian melarikan diri ke shelter-shelter yang juga ilegal (bukan KBRI). Melalui shelter ilegal inilah kemudian mereka disalurkan kembali ke berbagai sektor bahkan ke sektor-sektor yang sifatnya ilegal, seperti pelacuran sehingga menimbulkan isu trafficking.

Banyaknya persoalan TKI berdampak pada citra baik Indonesia dalam persoalan demokrasi di Yordania dan Timur Tengah tertutupi, bahkan lebih dikenal sebagai negara pengirim TKI informal. Persoalan ini menjadi rumit ketika dalam dunia diplomasi yang terjadi, banyak negara-negara sahabat atau pejabat dari pemerintahan Yordania mendekati pejabat KBRI Yordania hanya untuk dicarikan pekerja sektor informal. Hal ini menjadi simalakama tersendiri bagi KBRI Yordania. Apabila tidak dikabulkan, berimplikasi pada terciptanya hubungan tidak baik serta menghambat kinerja KBRI ke depan. Tetapi apabila dikabulkan, hanya akan melanggengkan stigma Indonesia sebagai negara pengirim TKI sektor informal.

Terkait persoalan dalam negeri dan kawasan regional, Yordania memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari negara-negara Arab lainnya. Misalnya, imun dari *Arab spring*. Yordania adalah negara penyangga bagi negara-negara Arab. Di negara ini, lebih dari 2 juta warga negara Palestina menjadi pengungsi dan lebih dari 200 ribu pengungsi dari Syiria. Para pendatang palestina memiliki hak yang sama, tetapi dengan beberapa keterbatasan seperti tidak memiliki hak untuk dipilih walaupun boleh memilih. Juga tidak dapat masuk kedalam beberapa instansi strategis, seperti intelijen.



Yordania sendiri bukan negara kaya seperti negara kawasan teluk lainnya. Ia tidak memiliki SDA yang melimpah, kecuali fosfat dimana Indonesia menjadi negara tujuan utama (Petro Kimia gersik) dengan pengelolaan yang masih belum optimal. Akibat kekurangan SDA, ketergantungan terhadap bantuan asing cukup besar, khususnya negara Barat dan Teluk. Bantuan keuangan datang dari Bahrain dan Qatar, Gas dari Mesir sementara minyak dari Irak.

Penguasa Yordania saat ini adalah Bani Hasyim. Selain Bani Hasyiem, juga ada bani lain, tetapi mereka hanya sampai pada level pemerintahan. Kelompok lainnya adalah warga negara Palestina yang telah menyatu dengan masyarakat. Hubungan dengan negara lain, khususnya Palestina-Israel, menjadi penting karena langsung berbatasan dan menyangkut wilayah kedaulatan Yordania. Demikian juga dengan dengan Iran dan Syiria. Kekhawatiran Yordania terhadap kedua negara ini adalah masuknya syiah. Dalam mensikapi persoalan Syiria, Yordania sangat berhati hati sekali karena pasukan militer Syiria sangat kuat dibanding Yordania.

Pemimpin Yordania relatif modern dan demokratis, mau membuka diri dalam dialog nasional dengan kelompok-kelompok lainnya. namun demikian, ada perbedaan kharisma antara Raja Husein dengan Raja Abdullah saat ini. Hal ini ditunjukkan oleh adanya sikap oposisi yang menginginkan peran raja dikurangi dan hal itu ditentang karena dianggap sebagai warisan budaya. Sebagian besar oposisi yang menginginkan berkurangnya peran raja tersebut bukan berasal dari warga negara Yordania asli.

Prospek ke depan, walaupun miskin, Yordania sangat strategis dan memiliki peran penting sebagai negara penyangga. Kendati terjadi tuntutan perubahan, stabilitas keamanan dan politik imun dari *Arab spring* karena didukung oleh militer, polisi dan intelijen. Indonesia tercatat sebagai negara di urutan kedua (setelah india) dalam persoalan ekspor impor. Karena stabilitasnya, Yordania dapat dijadikan wadah bagi Indonesia untuk memperluas ekonominya. Sayangnya, Indonesia belum secara konkrit menggarap potensi pasar di Timur Tengah, khususnya dalam menangkap potensi untuk menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan agar Indonesia bisa masuk. Hambatannya karena

belum ada *guideline* yang clear terkait mekanisme dan program lainnya dalam bidang ekonomi. Di setiap kementerian selalu ada biro Kerjasama Luar Negeri, tetapi mereka tidak memiliki keseragaman untuk menyusun satu sistem atau mekanisme dalam mempromosikan ekonomi atau program.

Dalam hubungan KBRI dengan Palestina, KBRI Yordania memiliki program *capacity building* yang ditujukan bagi para pemuda Palestina. Program tersebut sesuai dengan komitmen GNB untuk melatih 10.000 para pemuda Palestina. Presiden SBY langsung menunjukkan komitmennya dengan mengambil 1000 diantaranya untuk ditraining di Indonesia. Saat ini, tercatat 500 orang telah mengikuti program tersebut.

Untuk mempercepat rekonsiliasi nasional di Palestina, peran Indonesia sangat strategis. Tetapi peran tersebut dapat dilakukan dengan baik apabila Indonesia memiliki kantor perwakilan di Palestina. Karena itu perlu dilakukan untuk mempercepat pembukaan perwakilan di Palestina dalam rangka intensifikasi komunikasi Indonesia (sebagai fasilitator/mediator) dengan faksi-faksi lain di Palestina. Saat ini, justru ada banyak negara-negara Barat yang telah membuka kantor representasi di Palestina, tetapi tidak di deklarasikan secara resmi.

- 2) Dalam kunjungannya ke shelter penampungan TKI bermasalah di lantai bawah KBRI Yordania, Komisi I DPR RI cukup dikejutkan dengan banyaknya TKI, khususnya TKW yang bermasalah, mulai dari persoalan gaji yang tidak dibayar, penyiksaan oleh majikan, gaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, hingga persoalan KDRT. Beberapa diantara TKW tersebut ada yang menikah dengan penduduk lokal atau dengan imigran asing lainnya dan banyak yang telah memiliki anak. Nasib anak-anak tersebut sangat dikhawatirkan akan terlantar dikemudian hari. Seluruh TKW yang ditampung di shelter berkomitmen enggan kembali ke Yordania.

Dalam hal ini, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada pihak KBRI Yordania yang telah memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik terhadap warga negaranya. Namun demikian, KBRI mengeluhkan tingginya beban biaya yang harus dikeluarkan. Rata-rata mencapai 1,5 juta rupiah perorang, dalam satu bulan. Saat ini, ada sekitar 50 TKW

yang ditampung di shelter. Dalam kasus emergency, jumlahnya bisa mencapai 400 orang.

3) Dalam acara dialog Komisi I DPR RI dengan para warga Indonesia yang ada di Yordania, tim kunjungan Komisi I DPR RI mendapatkan apresiasi dari seluruh pihak, baik mahasiswa maupun kalangan profesional. Berikut adalah Pernyataan Sikap Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Yordania perihal Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI:

- a. Kami HPMI Yordania mengapresiasi delegasi Komisi I DPR atas kunjungan ke jalur Gaza pada tanggal 27-Desember-2012. (HPMI) mendukung kunjungan anggota Komisi I DPR karena kunjungan ini sangatlah bermanfaat bukan saja untuk memberikan dukungan kepada Gaza atau palestina yang sedang terjajah, tetapi juga menunjukkan keeksistensian negara republik indonesia dikancah dunia. Dan kunjungan ini juga sesuai dengan muqoddimah pembukaan UUD45 yang menyebutkan bahwa "penjajahan diatas dunia harus di hapuskan, karna tidak sesuai dengan dengan pri kemanusiaan dan prikeadilan".
- b. Kami HPMI Yordania sangat mengapresiasi kepada delegasi yang memberangkatkan dirinya pada kunjungan kali ini (Gaza) dengan uang pribadi mereka.
- c. Kami HPMI Yordania meminta kesedian kepada delegasi Komisi I DPR agar dapat menceritakan perjalanan selama kunjungan kali ini. Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, DPR RI juga diminta bersedia mensosialisasikan hasil kunjungan kerja yang berupa laporan, rekomendasi dan lainnya untuk dipublikasikan di situs komisi atau DPR.

Dalam kesempatan ini juga, Komisi I DPR RI menyampaikan sumbangan uang tunai kepada para mahasiswa Indonesia di Yordania.

### **3. Palestina**

Palestina merupakan tujuan utama dari kunjungan spesifik Komisi I DPR RI ke luar negeri. Tujuannya adalah untuk menjajaki pembukaan perwakilan RI di Palestina, melihat kondisi dinamika sosial politik terkini secara langsung pasca serangan Gaza oleh Israel selama 8 hari, dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina, serta penyampaian bantuan kemanusiaan. Kunjungan Komisi I DPR RI di Palestina bertepatan dengan momen bersejarah yaitu ditetapkannya status Palestina sebagai *non-state member* di PBB pada 29

November 2012. Dengan demikian, kunjungan Komisi I DPR RI ke Palestina merupakan kunjungan kehormatan dan resmi yang dilakukan pertama kali oleh masyarakat internasional setelah Palestina memperoleh status barunya di PBB. Komisi I DPR RI juga merupakan institusi asing yang pertama kali secara langsung bertemu dengan Presiden Mahmoud Abbas untuk menyampaikan ucapan selamat.

Status baru Palestina di PBB dihasilkan berdasarkan voting Majelis Umum PBB pada 29 November 2012. Dari 193 negara anggota PBB, 138 menyetujui Palestina tidak lagi hanya berstatus sebagai “pengamat” melainkan sudah menjadi “negara pengamat non-anggota” atau “*non state member*”. Sembilan negara, seperti Amerika dan Israel menentang, 41 abstain, serta tiga negara tidak ikut serta dalam pemungutan suara. Setidaknya, 17 negara di Eropa mendukung lahirnya Negara Palestina yaitu Austria, Prancis, Italia, Norwegia, dan Spanyol. Ini merupakan hasil upaya Abbas yang fokus melobi Eropa. Sementara Inggris, Jerman, dan lain-lain memilih untuk abstain. Dengan dikabulkannya permohonan Palestina melalui pemungutan suara, maka secara tidak langsung kedaulatan Palestina sebagai negara sudah diakui.

Seperti diketahui, Palestina saat ini “terbelah dua” antara Gaza yang dikontrol oleh pejuang HAMAS dan Tepi Barat yang dikontrol oleh pejuang Fatah. Gaza berada pada posisi yang berbatasan dengan Mesir, sementara Tepi Barat berbatasan dengan Yordania. Kunjungan ke Gaza dilakukan setelah Komisi I DPR RI menyelesaikan agendanya di Mesir dan kunjungan ke Ramallah dilakukan setelah usai agenda di Yordania.

#### **a. Gaza**

Dalam kunjungan ke Gaza, Komisi I DPR RI melakukan lawatan ke *Palestinian Legislative Council/PLC*, Perdana Menteri Palestina Ismael Haniya, takziah ke rumah korban penyerangan Israel, Ahmed Ja’bar, serta meninjau lokasi pembangunan rumah sakit Indonesia, Assyifa.

Perjalanan ke Gaza ditempuh melalui jalur darat dari Kairo menembus perbatasan Semenanjung Sinai, sebuah wilayah yang bersejarah karena pernah direbut Israel pada perang 1967 tetapi berhasil kembali direbut Mesir pada perang Yom Kippur 1973. Delegasi menempuh perjalanan sekitar lima jam untuk tiba di kota El Arish yang berjarak 35 Km dari Rafah, wilayah perbatasan Mesir-Palestina (Gaza). Di El Arish, senyampang menunggu izin lewat dari imigrasi Mesir ke Gaza, delegasi

beristirahat semalam dan bertemu dengan para sukarelawan dari beberapa LSM Indonesia.

Memasuki gerbang pintu Gaza, Palestina, delegasi Komisi I DPR RI disambut oleh salah seorang anggota Parlemen Palestina Dr Yousef beserta protokoler parlemen. Sejenak beramah tamah, delegasi kemudian diantar untuk bertemu Parlemen Palestina (PLC) di Gaza. Dalam perjalanan tersebut, nampak jelas beberapa reruntuhan gedung akibat serangan Israel. Di PLC, delegasi diterima oleh Wakil Parlemen, Ahmed Bahar. Ketua Komisi menyampaikan maksud dan kedatangan kunjungan sebagai bentuk dukungan, simpati dan empati dari bangsa Indonesia terhadap perjuangan dan penderitaan rakyat Palestina di Gaza. Palestina merupakan bagian dari sejarah dan psikologi sosial masyarakat Indonesia yang tidak bisa dipisahkan. Secara resmi, kunjungan ini juga dimaknai sebagai dukungan politik secara penuh dari Indonesia terhadap Palestina.

Wakil Parlemen Ahmed Bahar menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan warga Indonesia terhadap Palestina baik pada serangan pada tahun 2008 maupun 2012 serta pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Bahar juga menyampaikan kisah bagaimana penderitaan rakyat Palestina dalam menghadapi serangan roket-roket Israel. Namun dibalik penderitaan tersebut, nampak adanya kekuatan dan tekad kuat rakyat Gaza untuk terus melakukan perlawanan terhadap agresi Israel. Kesepakatan gencatan senjata yang dibuat Israel adalah wujud dari ketidakmampuan Israel dalam mengalahkan rakyat Gaza.

Usai acara resmi, delegasi kemudian dijamu makan siang bersama dengan seluruh anggota PLC yang ada dalam sebuah meja panjang. Dalam kesederhanaan yang ada, mereka berupaya menjamu delegasi dengan makanan terbaik dan terbanyak yang mereka miliki. Satu baki penuh nasi dan ayam utuh satu potong untuk dua orang, dimakan secara bersama, semakin menanamkan rasa persatuan dan persaudaraan yang kuat antara Indonesia dan Palestina.

Delegasi kemudian menuju ke rumah atau kamp penampungan dimana di dalamnya terdapat kediaman Perdana Menteri Palestina Ismael Haniya. Dalam kesederhaannya, wibawa Ismael Haniya kuat memancar. Dalam sambutannya, Ismael Haniya menyampaikan bahwa kunjungan ini bukan kunjungan pertama dari Indonesia, tetapi sangat spesial karena dilakukan

setelah gencatan senjata serangan 8 hari Israel. Kunjungan ini memiliki 3 makna. Pertama menunjukkan bahwa masalah palestina bukan saja masalah rakyat Palestina, tetapi milik Arab, Islam dan dunia. Kedua, karena itu, kemenangan yang dicapai Palestina di Gaza bukan hanya milik Palestina, tetapi milik semua. Makna terakhir dari kunjungan ini adalah menunjukkan bahwa Palestina tidak sendiri dalam menghadapi blokade Israel.

Dari delegasi Indonesia, selain menyampaikan rasa simpati dan dukungan, juga disampaikan adanya bantuan dari masyarakat Indonesia dalam bentuk obat-obatan, perlengkapan medis dan juga uang. Jumlah total keseluruhan mencapai US\$ 1 juta.

Malam harinya, delegasi melakukan takziah ke rumah korban serangan rudal Israel, Ahmad Ja'bari. Ahmad Ja'bari adalah seorang komandan sayap militer Hamas, al-Qassam, yang tewas dalam kendaraannya karena dirudal oleh Israel. Turut tewas bersamanya adalah anak, saudara dan pamannya. Selain menyampaikan duka cita terhadap para korban dan simpati serta dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina di Gaza, delegasi juga menyampaikan donasi sebagai tanda cinta kasih kepada keluarga korban. Sebagai balasan, keluarga korban memberikan beberapa kenangan milik Ahmad Ja'bari berupa mushaf al-Quran dan beberapa cinderamata dari tanah suci. Dari rumah Ja'bari, delegasi juga meninjau beberapa gedung yang hancur akibat serangan rudal Israel, diantaranya gedung kantor PM Ismael Haniya.

Malam itu merupakan tepat malam dimana keputusan bersejarah PBB terkait status Palestina dihasilkan. Palestina dipastikan menjadi *non-state member* di PBB, setingkat di bawah negara anggota. Dengan status ini, Palestina telah diakui sebagai negara penuh dan berdaulat serta berhak menjadi anggota badan-badan PBB, seperti ICC. Dengan masuk dalam ICC, Palestina bisa menyeret Israel ke mahkamah internasional dengan tuduhan penjahat kemanusiaan. Dengan status ini pula, Israel akan berhati-hati apabila melakukan serangan atau agresi militer ke wilayah-wilayah Palestina. Atas status ini, warga Gaza menyambutnya dengan mengadakan long march mengelilingi kota. Serangan ke Gaza dan peningkatan status menjadi momentum krusial bagi rekonsiliasi Palestina.

Kunjungan delegasi pada hari terakhir di Gaza adalah ke Rumah Sakit Indonesia Gaza, Al-Syifa. Al-Syifa merupakan rumah sakit yang sepenuhnya dibiayai oleh warga Indonesia dan dibangun oleh relawan Indonesia dari Mer-C. Jumlah pekerja rumah sakit ini 28 orang. Tidak ada biaya maupun bantuan dari pihak manapun. Pemerintah Palestina, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, hanya mewakafkan tanah untuk lahan pembangunan. Menurut koordinator relawan pembangunan, Nur Ikhwan, untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit tersebut dibutuhkan dana sekitar Rp 30 miliar. Tahap yang telah diselesaikan saat ini adalah pembangunan dinding dan pondasi bangunan dengan biaya US\$ 1 juta.

Arsitek rumah sakit Indonesia di Gaza sangat spesial karena berbeda dari arsitek bangunan lain yang ada di Gaza. Bentuk bangunan dibuat menyerupai masjid al-Aqsha dan sangat kokoh. Ke depan, direncanakan oleh pemerintahan otoritas Palestina di Gaza, rumah sakit ini akan menjadi rumah sakit pusat, sementara rumah sakit yang telah ada difungsikan sebagai klinik.

Tidak jauh dari seberang rumah sakit Gaza terdapat sebuah lokasi yang telah ditutupi oleh tembok beton tinggi. Lokasi tersebut dulunya adalah area pelatihan brigadir Qassam yang di hancurkan oleh Israel. Beberapa kepingan peluru kendali masuk ke dalam rumah sakit yang tengah dibangun. Kecuali sebuah jendela yang rusak akibat hempasan angin rudal, tidak ada kerusakan lain yang dialami rumah sakit ini.

Gaza adalah sebuah wilayah Palestina yang berbatasan dengan Mesir dan Israel. Wilayah ini kerap menjadi ajang pertempuran antara Israel dan warga Palestina. Luasnya sekitar 360 km. Gaza memiliki perbatasan langsung dengan laut. Tetapi akses yang dapat dimanfaatkan dari laut tersebut saat ini hanya 6 mil. Apabila melebihi batas tersebut, militer Israel akan menembaknya. Di udara, pesawat-pesawat tempur Israel terus melakukan patroli. Karenanya, secara darat, laut dan udara, wilayah ini terblokade dan disebut sebagai penjara terluas di dunia. Akibat blokade Israel, perekonomian Gaza tidak dapat berkembang maju. Kehidupan sosialnya tidak dapat berkembang dan masyarakat Gaza harus hidup dengan kondisi perekonomian dan lingkungan yang buruk. Lapangan kerja sangat sukar diperoleh, pengangguran cukup tinggi. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya gedung-gedung yang hancur akibat serangan udara Israel. Gaza tidak ubahnya layak kota tanpa masa depan.

Namun gambaran tersebut sirna apabila melihat secara langsung kehidupan masyarakat Gaza. Gaza memang terisolasi dan kumuh. Tetapi masyarakat Gaza adalah masyarakat yang tegar, penuh semangat dan optimis, tipe masyarakat pekerja keras dan pejuang. Masyarakat Gaza juga adalah masyarakat yang terbuka, ramah dan senang bergaul. Dalam beberapa hal, Gaza bahkan lebih baik Mesir atau kota-kota lain yang merdeka di banyak negara. Dalam penderitaan dan tekanan Israel, masyarakat Gaza telah mampu bertahan hidup dengan caranya sendiri. Namun mereka tidak akan lama lagi mampu bertahan apabila tidak ada kepedulian dan bantuan internasional.

#### **b. Ramallah, Tepi Barat**

Di Tepi Barat, delegasi Komisi I DPR RI mengadakan kunjungan ke Gubernur Jericho, Presiden Mahmoud Abbas, PLC dan ke Masjid Kudus al-Aqsha. Jarak Yordania ke Tepi Barat dan juga Ramallah tidaklah begitu jauh. Tetapi proses imigrasi Israel serta banyaknya check point militer Israel yang harus dilalui membuat perjalanan menjadi lama. Di Tepi Barat, kondisi sosial masyarakat relatif laebih baik dari Gaza. Hal ini terlihat dari bentuk bangunan dan rumah penduduk yang lebih bagus dan lebih tertata.

Setelah berhasil memasuki Tepi Barat, delegasi melakukan kunjungan salam hormat ke Gubernur Jericho. Dari kantor gubernur ini, delegasi langsung menuju Ramallah. Ramallah adalah sebuah wilayah di Tepi Barat yang menjadi pemukiman warga Palestina dan berada dalam kekuasaan otoritas Palestina. Ramallah, dan juga Bethlehem seta Nazareth, adalah beberapa kota-kota tua di Tepi Barat, Palestina. Meskipun penduduknya mayoritas beragama Islam, telah ada ketentuan yang mentradisi bahwa tiga kota tersebut harus dipimpin oleh walikota yang beragama Kristen. Hal ini menunjukkana bahwa toleransi dan penghormatan pada tradisi leluhur sangat kuat dianut masyarakat Palestina. Di Palestina, hidup rukun berdampingan antara orang Islam, Kristen danjuga Yahudi asli Palestina.

Di Ramallah-lah kantor otortias Palestina, Pesiden Mahmoud Abbas, terdapat. Tetapi untuk memasuki wilayah ini, semua orang harus mendapatkan ijin dari tentara Israel yang menjaga pintu masuk atau check point. Di Tepi Barat, terdapat 400 check point. Beberapa diantaranya permanen, yang lainnya berpindah-pindah. Disini nampak bahwa



kedaulatan Gaza jauh lebih terjaga daripada Tepi Barat karena izin masuk Gaza dikuasai sepenuhnya oleh otoritas Palestina. Hal ini terjadi karena bagi Israel, Tepi Barat, dimana di dalamnya terdapat Yerusalem, merupakan wilayah utama perebutan sehingga perlu diciptakan kondisi faktual bahwa Israel lah yang berkuasa di wilayah tersebut.

Wilayah Tepi Barat dibagi dalam tiga lokasi atau tipe: A,B dan C. Tipe A adalah wilayah yang dikuasai atau dikontrol sepenuhnya oleh Palestina, baik sipil maupun Militer. Wilayah B adalah wilayah yang dikontrol oleh Palestina secara sipil, namun secara militer berada di bawah Israel. Wilayah C adalah wilayah yang seluruhnya berada dalam kontrol Israel, baik sipil maupun militer. Dalam perjalanan menuju Ramallah dan di tepi Barat secara keseluruhan, nampak tembok-tembok beton yang dibangun Israel sebagai pembatas antara penduduk Palestina dengan Pemukiman Yahudi. Tembok-tembok tersebut dibangun di beberapa tempat sehingga konsep akhirnya adalah seluruhnya menyatu. Apabila menyatu, maka Yerusalem akan terbagi dua, Barat dan Timur. Beberapa kota juga menjadi terisolasi akibat tembok tersebut. Di wilayah lain, ada kota yang justru terpisah karena terhalang oleh tembok pemukiman Yahudi tersebut. Di setiap perbatasan kota akan ada check poin yang dikontrol oleh militer Israel. Masyarakat Palestina menjadi terasing dan terisolasi di tanahnya sendiri.

Di Ramallah, delegasi bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Namun sebelum pertemuan, delegasi menyempatkan untuk berziarah ke makam Yasser Arafat untuk menyampaikan doa serta meletakkan karangan bunga sebagai ungkapan kebahagiaan atas status baru Palestina di PBB. Di makam tersebut nampak hanya ada 2 karangan bunga, yaitu dari Presiden Mahmoud Abbas dan dari Komisi I DPR RI. Dengan demikian, Komisi I DPR RI adalah delegasi resmi luar negeri yang pertama kali mengucapkan selamat dan meletakkan karangan bunga di makam Yasser Arafat.

Presiden Mahmoud Abbas tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya ketika menyambut delegasi Komisi I DPR RI terlebih ketika ketua tim delegasi Komisi I DPR RI menyampaikan ucapan selamat atas status Palestina di PBB dan mengulang kembali ayat al-Quran yang diucapkan oleh Presiden Mahmoud Abbas dalam sambutan pidato di PBB. Kesederhanaan dan kerendah hatian dan kebahagiaan tersebut kemudian

diwujudkan dengan “melanggar” aturan protokol yang ada. Berdasarkan aturan, hanya delegasi resmi (10 orang) saja yang berhak mengikuti pertemuan dengan Presiden Mahmoud Abbas. Tetapi Presiden kemudian mengizinkan semua rombongan, termasuk wartawan untuk tetap di ruangan.

Dalam pertemuan tersebut, Mahmoud Abbas memaklumi keterlambatan delegasi dan mengatakan bahwa persoalan di perbatasan adalah upaya sengaja dan siasat Israel untuk memberikan hukuman terhadap Indonesia. Presiden secara khusus mengakui menonjolnya peran Indonesia di PBB terkait isu Palestina yang membuat Israel marah. Dinyatakan bahwa keberadaan dan peran Menlu Indonesia di PBB bukan hanya representasi masyarakat dan pemerintah Indonesia, tetapi sekaligus wakil Arab dan Dunia.

Perjuangan yang hendak ditonjolkan oleh Palestina dalam menghadapi Israel adalah dengan mengutamakan cara damai, bukan dengan cara-cara perang. Namun upaya penentangan damai ini justru datang dari Israel sendiri. Langkah Palestina bukan untuk menentang atau meniadakan Israel, tetapi menentang penjajahan Israel dengan prioritas menghentikan pembangunan pemukiman. Palestina juga mendesak masyarakat internasional, khususnya Amerika dan Eropa, menekan laju pembangunan tersebut sebagaimana Konvensi Jenewa menyebut pembangunan tersebut sebagai sesuatu yang tidak sah.

Komisi I DPR RI juga meminta agar momen peningkatan status Palestina di PBB dijadikan momen penting bagi rekonsiliasi Palestina. Disampaikan oleh ketua tim delegasi bahwa ketika pengumuman penetapan status Palestina di PBB, delegasi Komisi I DPR RI tengah berada di Palestina sehingga dapat melihat langsung ekspresi kegembiraan rakyat Palestina baik mereka yang berasal dari faksi Fatah, Hamas maupun kelompok-kelompok perjuangan kemerdekaan Palestina lainnya. Semuanya membaur menjadi satu, melupakan perbedaan yang ada kecuali satu Palestina. Terkait konflik antar faksi di Palestina, Presiden menjelaskan saat ini sedang dilakukan upaya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas.

Komisi I DPR RI kemudian berkomitmen akan memperjuangkan status Palestina merdeka melalui jalur diplomasi parlemen dan mendesak

pemerintah yang ada untuk segera membuka perwakilan Indonesia di Palestina sebagai penguat eksistensi Palestina.

### III. REKOMENDASI DAN PENUTUP

#### a. Rekomendasi

Terkait kunjungan spesifik Komisi I DPR RI ke Palestina, Mesir dan Yordania, maka beberapa hal berikut yang menjadi rekomendasi Komisi I DPR RI adalah:

1. Komisi I DPR RI memberikan apresiasi terhadap peran dan perjuangan Menteri Luar Negeri dalam mendukung perjuangan Palestina sehingga Palestina mendapatkan status baru di PBB sebagai *non state member*.
2. Perlunya ditindaklanjuti usulan peningkatan hubungan Indonesia – Mesir mengingat banyaknya pemuda Indonesia saat ini yang belajar di Mesir dan berpotensi menjadi pemimpin bangsa dan negara di masa depan, serta menjajaki kerja sama ekonomi perdagangan yang lebih intensif antar pelaku ekonomi Mesir dan Indonesia
3. Perlu ditindaklanjuti usulan Liga Arab agar Indonesia (melalui KBRI di Kairo) mengajukan proposal kerjasama dengan Liga Arab dan negara-negara Islam lainnya dalam membangun kerjasama di bidang ekonomi, media dan teknologi Informasi.
4. Menindaklanjuti kunjungan ke Mesir dan Yordania, momentum transisi demokrasi di 2 negara tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk membangun ide kerjasama Indonesia – Mesir dan Indonesia – Yordania dalam bidang pembangunan demokrasi, seperti *capacity building* atau *human resources development* dan penguatan kerjasama institusi parlemen.
5. Mesir dan Yordania memiliki peranan yang cukup besar dalam mensukseskan masuknya misi-misi kemanusiaan dan politik dari Indonesia ke Palestina. Dari dulu hingga saat ini Mesir dan Yordania telah menempatkan dirinya sebagai negara yang menunjukkan dukungan penuh dan mau bekerjasama bahkan membantu Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina. Karena itu, sikap kooperatif Mesir dan Yordania ini perlu diapresiasi oleh Indonesia baik melalui penghargaan langsung, maupun melalui peningkatan kerjasama dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya maupun aspek kehidupan lainnya.

6. Keinginan Menteri Pembangunan Politik dan Urusan Parlemen Yordania, Bassam Haddadin, yang mengharapkan adanya peningkatan kerjasama parlemen untuk mendukung status palestina perlu ditindaklanjuti.
7. Sebagai negara penyangga dan strategis, serta imun dari instabilitas, Yordania memiliki prospek yang sangat baik. Karena itu, Indonesia harus dapat memanfaatkan Yordania sebagai wadah bagi Indonesia untuk memperluas ekonominya. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Luar Negeri harus membuat *guideline* yang clear terkait mekanisme dan program lainnya dalam bidang ekonomi di setiap instansi pemerintahan agar tercipta keseragaman untuk menyusun satu sistem atau mekanisme dalam mempromosikan ekonomi atau program lainnya di luar negeri.
8. Terkait dengan persoalan TKI yang menciptakan stigma bagi Indonesia dan menghambat kinerja dan upaya diplomasi, Komisi I DPR RI minta agar Kementerian Luar Negeri mendesak semua instansi terkait untuk menghentikan pengiriman TKI non-profesional ke luar negeri serta memberikan sanksi tegas bagi siapapun dan dari instansi manapun yang memberikan akses bagi TKI non-profesional untuk bekerja di luar negeri
9. Terkait dengan telah ditetapkannya status Palestina di PBB sebagai *non-state member* yang juga berarti pengakuan terhadap Palestina sebagai negara, Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk sesegera mungkin membuka kantor perwakilan di Tepi Barat dan Gaza. Pembukaan kantor perwakilan tersebut selain sebagai dukungan dan pengakuan akan eksistensi Palestina, juga merupakan upaya untuk mempercepat rekonsiliasi nasional rakyat Palestina. Melalui kantor perwakilan, Indonesia akan dapat lebih mudah memerankan diri sebagai fasilitator atau mediator.
10. Usulan PNC untuk membentuk Komite Persaudaraan Indonesia Palestina yang beranggotakan parlemen Indonesia dan Palestina, perlu ditindaklanjuti.
11. Komitmen Indonesia terhadap pelatihan rakyat Palestina dari segala unsur harus lebih ditingkatkan untuk membangun hubungan yang lebih baik di masa yang akan datang. Terkait hal tersebut, maka mulai tahun 2013 Komisi I DPR RI akan menggagas program *children diplomacy* yang ditujukan bagi anak-anak Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
12. Terkait dengan kesan adanya ketimpangan dukungan dan program Indonesia terhadap salah satu faksi di Palestina (bantuan materi hanya untuk Gaza sementara program pelatihan hanya untuk Tepi Barat), maka Kementerian Luar Negeri perlu melakukan pemetaan dan kajian ulang serta mengkoordinir penyaluran seluruh program dan bantuan yang mengalir ke Palestina agar lebih berimbang.

## **b. Penutup**

Demikian laporan kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI ke Palestina, Mesir dan Yordania ini disampaikan. Semoga Allah SWT. senantiasa meridhoi dan segala amal perbuatan kita.

Ketua Delegasi Komisi I DPR RI

Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si

A-73